

(Original Article)

Proses Perencanaan Pembangunan dengan Menganalisis Potensi Unggulan Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Kawasan Margonda Kota Depok)

Wahdah Hazizah¹, Rahman Mulyawan², Jajang Sutisna³¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Indonesia²Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Indonesia³Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Indonesia*Correspondence: wahdah21001@mail.unpad.ac.id**Abstract**

Development can be defined as a change towards a better state through various efforts that are carried out in a planned manner. Planning and development are inseparable and interrelated. In other words, development requires planning, and this must be realized in development, starting from the regional to the central level. This study aims to examine the government's role in shaping the direction of development, particularly in the Margonda area of Depok City. This area is identified as a promising support area for enhancing the city's economic growth, given its diverse potential and opportunities. The research methodology employed in this study is a case study approach, utilizing a qualitative analysis. The study employs the concept of development planning stages proposed by Lora Ekana Nainggolan, et al. (2023). The results indicate that the government has not fully engaged the community, particularly MSME actors in the Margonda area, in the formulation of programs and policies. However, the local regulations established by the government have comprehensively addressed program implementation, financing of programs or activities to be carried out, and the determination of the vision and mission of development. The vision and mission of development articulated by the Depok City Government are predicated on a future state that is expected to be achieved, rather than on a current or actual state of affairs.

Keywords

development planning, economic growth, margonda area

Received: 6 February 2025; Revised: 15 March 2025; Accepted: 21 April 2025

Pendahuluan

Berbicara mengenai pembangunan, maka tentunya kita tidak akan pernah lepas dari tujuan pembangunan itu sendiri yakni pertumbuhan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam Didi Djadjuli (2018), proses pertumbuhan diawali pada saat perekonomian dapat melaksanakan pembagian kerja, pembagian kerja tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, ia juga menambahkan bahwa pentingnya skala ekonomi, dengan meningkatnya pasar, maka akan terbuka berbagai inovasi baru yang pada saatnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan pembagian kerja.

Adanya asas desentralisasi yang mana pemerintah memberikan keleluasan dan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengembangkan pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki daerahnya, hal ini tentu dimanfaatkan oleh setiap daerah untuk lebih mengenal keunggulan yang dimiliki mencakup sumber daya alam seperti pertanian, pertambangan, perikanan, serta industri, jasa, perdagangan dan pariwisata yang berdampak terhadap sumber perekonomian daerah. Selain itu, pembangunan ekonomi

daerah merupakan proses dimana masyarakat dan pemerintah mengendalikan berbagai sumber daya yang tersedia dan membangun sebuah pola hubungan antara sektor swasta dengan pemerintah daerah untuk melahirkan suatu lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan kegiatan perekonomian dalam daerah tersebut (Yunani, 2022). Masih di dalam sumber yang sama, dalam pembangunan ekonomi yang menjadi permasalahan utamanya ialah berada di berbagai kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada karakteristik daerah terkait dengan memanfaatkan potensi sumber daya kelembagaan, manusia, dan sumber daya fisik daerah. Hal ini berfokus pada pengambilan berbagai inisiatif yang bersumber dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mendorong peningkatan ekonomi dan mewujudkan peluang kerja baru.

Menurut Latuconsina, pembangunan yang berbasis kewilayahan dapat memberikan sebuah deskripsi sudah sejauh mana sebuah daerah mempunyai peluang untuk berkembang (Noviyanti, 2020). Seperti yang telah tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029 yang telah diubah menjadi Perda Provinsi Jawa Barat tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042 memaparkan bahwa terdapat enam WP (Wilayah Pengembangan) salah satunya ialah WP Bodebekpunjur yang terdiri dari Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, dan sebagian Cianjur. Dimana terdapat berbagai sektor yang mempunyai keunggulan untuk bisa dikembangkan di wilayah ini yaitu seperti industri manufaktur, agribisnis, pariwisata, perikanan, jasa, agrowisata, pertambangan, dan perdagangan.

Pembangunan yang berdimensi kewilayahan ini dapat tercapai dengan mengembangkan keunggulan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Berdasarkan data dari BPS, wilayah pembangunan Bodebekpunjur dan wilayah khusus cekungan Bandung telah menguasai aktivitas perekonomian Jawa Barat dengan share hingga 60% dari PDRB Jawa Barat (Noviyanti, et al., 2020). Eksplorasi potensi ekonomi sangat penting untuk dilakukan karena merupakan bagian terpenting dalam persepsi pembangunan berbasis kewilayahan. Hal ini juga bertujuan agar konvergensi ekonomi dapat dilaksanakan terutama dengan memperkuat transformasi dan akselerasi. Sementara itu, menurut Ferdian perencanaan pembangunan daerah yang tidak terencana dengan baik atau buruk dapat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah tersebut (Amrin et al, 2023).

Berhubungan dengan penjelasan tersebut, menjadi menarik untuk dapat diulas mengenai pembangunan yang sedang berlangsung di Kota Depok. Perkembangan yang terjadi di Kota Depok sejauh ini dari aspek demografis, sumber pendapatan, dan geografis berjalan begitu pesat, terutama dibidang pembangunan. Kemudian, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, menjadikan daerah tersebut sebagai pusat jasa dan perdagangan. Pembangunan di Kota Depok dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merujuk pada pembangunan nasional yang dilakukan oleh seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tahun 2023 nilai PDRB Kota Depok atas dasar harga konstan mencapai 55, 22 triliun rupiah. Angka ini naik sebesar 2, 66 triliun dari sebelumnya 52, 56 triliun pada tahun 2022 berdasarkan Laporan BPS Kota Depok 2019-2023. Kemudian, berdasarkan laporan BPS Kota Depok terkait PDRB Kota Depok menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2023, selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kota Depok masih ditopang oleh kinerja berbagai lapangan usaha seperti industri pengolahan, perdagangan eceran dan besar (reparasi motor dan mobil), serta

konstruksi. Secara bersamaan ketiga kategori tersebut mempunyai peranan sebesar 70, 90 persen terhadap total PDRB yang dimiliki Kota Depok.

Di Kota Depok, potensi unggulan dalam perekonomian tergambar dengan jelas dari kontribusi PDRB yang mayoritas disumbangkan oleh sektor tersier. Sektor ini melingkupi jasa, perdagangan, dan sektor lainnya yang telah tumbuh secara pesat serta menjadi penopang perekonomian kota. Kemudian, pembangunan yang semakin pesat di Kota Depok memperlihatkan tingginya aktivitas ekonomi di kota tersebut. Termasuk salah satunya ialah Margonda yang merupakan sebuah wilayah di Kota Depok. Margonda adalah salah satu kawasan terdapat di Kota Depok dengan konsep mix used building artinya sebuah kawasan yang terintegrasi yang terdiri atas kantor, pendidikan, tempat tinggal, pusat perbelanjaan, dan fungsi kota lainnya (property.kompas.com). Kemudian, wilayah Margonda tersebut merupakan sebuah wilayah yang berfungsi sebagai Center Business District seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 – 2042 Pasal 13 sehingga Wilayah ini menjadi pusat dari kegiatan pemerintahan, bisnis, dan ekonomi kota.

Jika dilihat sektor tersier yang menjadi tumpuan Kota Depok dalam perekonomian memang sangat dominan ada di berbagai titik kawasan Margonda. Perkembangan yang begitu pesat terhadap sektor tersier ini memperlihatkan bahwa Kota Depok mempunyai daya tarik yang kuat untuk pelaku ekonomi dan investor. Pemerintah harus lebih cermat lagi dalam melihat potensi besar yang dimiliki bidang ini di kawasan Margonda dan merancang regulasi yang mendorong pengembangan dan keberlanjutan sektor ini. Akan tetapi, untuk dapat memastikan sektor tersebut dapat terus tumbuh dan berkembang secara optimal, pemerintah harus mencermati berbagai isu penting yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, seperti keterbatasan infrastruktur penunjang, kemacetan, serta masalah perencanaan pembangunan yang belum dilakukan secara optimal.

Selain itu, karena pembangunan terus dilakukan di daerah Margonda tentu hal ini menimbulkan kesenjangan pembangunan di daerah lainnya yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh M. Hasbullah Rahmat, S. Pd, M. Hum selaku anggota DPRD Jawa Barat (faktabandungraya.com), membenarkan bahwa akhir-akhir ini timbul anggapan dari masyarakat yang mengatakan jika pembangunan di Kota Depok hanya terpusat di kawasan Margonda atau Margondasentris. Kota Depok mempunyai 11 Kecamatan, tetapi hanya kawasan Margonda yang mempunyai tingkat kemajuan cukup pesat, sementara perkembangan pembangunan di wilayah lainnya terbilang cukup lambat. Pertumbuhan perekonomian suatu daerah tentunya didorong infrastruktur yang layak. Apabila infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi hanya dilakukan terpusat di kawasan Margonda, maka efeknya akan dirasakan oleh wilayah lainnya yang tidak memperoleh perhatian serupa. Hal tersebut tentu dapat menurunkan minat masyarakat sekitar untuk membuka usahanya di wilayah-wilayah tersebut, serta membuat para investor ragu dan mengurungkan niat untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut karena kondisi sarana dan prasarana penunjang yang kurang memadai untuk mendukung usaha mereka. Sehingga, disparitas ekonomi antar wilayah semakin meluas dan keunggulan perekonomian di beberapa wilayah yang terabaikan menjadi dapat berkembang dengan maksimal.

Hal tersebut didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Hendra, et al (2019) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan ekonomi, karena dapat mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan perkapita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya infrastruktur sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan

ekonomi itu harus dibangun secara merata disetiap wilayah. Para pelaku usaha tentunya akan tertarik untuk berinvestasi di suatu wilayah dengan memperhatikan kondisi infrastruktur yang bisa mendukung kelancaran dan prospek perputaran uang yang besar.

Masalah perencanaan pembangunan di kawasan Margonda memang sangat beragam dan kompleks. Salah satunya adalah soal kemacetan yang tidak pernah luput untuk dibahas jika menyangkut kawasan Margonda, hal ini terjadi karena Margonda dijadikan sebagai pusat perekonomian Kota Depok. Sebagai salah satu kawasan yang ramai terhadap aktivitas perdagangan dan bisnis, kawasan Margonda menjadi titik pertemuan antar beragam kendaraan, baik untuk kegiatan mobilitas masyarakat atau distribusi barang. Kemacetan yang kian hari makin parah mengakibatkan kelancaran arus jasa dan barang semakin terganggu, yang pada saatnya akan memengaruhi efisiensi di kawasan tersebut.

Selain itu, persoalan penataan jalan yang dilaksanakan secara bertahap juga lambat laun semakin memperburuk keadaan. Proses perencanaan dan penerapan yang membutuhkan izin yang panjang kerap kali membuat pembangunan sarana dan prasarana jalan menjadi terhambat. Masyarakat pun mulai merasa jika perhatian yang diberikan pemerintah hanya terfokus pada salah satu wilayah saja, padahal kebutuhan akan sarana infrastruktur di wilayah lainnya juga penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Selanjutnya, keterbatasan lahan di kawasan Margonda menjadi masalah serius yang ditemui pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Lahan yang hari makin terbatas dan mahal membuat pemerintah sulit untuk membuat sarana publik yang layak untuk menunjang kegiatan ekonomi dan hal ini juga membuat para pelaku usaha yang akan membuka bisnis di kawasan Margonda berpikir dua kali karena harga lahan dan sewa yang mahal tentu akan memberatkan mereka. Dengan tingkat kemacetan dan keterbatasan lahan yang terus meningkat, masyarakat semakin merasakan efek yang ditimbulkannya. Terhalangnya pembangunan infrastruktur yang fundamental untuk menunjang kelancaran perekonomian tentunya menambah beban hidup bagi masyarakat yang telah bergantung pada kawasan Margonda untuk aktivitas ekonomi mereka.

Oleh karena itu, untuk menunjang penelitian ini, penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan secara signifikan antara penelitian yang sedang dilaksanakan dan yang sudah ada. Dengan demikian, dapat memberikan kontribusi baru dan memperluas informasi terhadap isu yang diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Sudaning dan Ketut Agus Seputra (2019) yang berjudul “Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” dimana keduanya menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan yang baik adalah pembangunan yang didukung dengan ketersediaan informasi dan data, berkaitan dengan sumber daya penunjang pembangunan, baik berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun sumber daya energi, serta beragam persoalan yang dapat dikemukakan sebagai agenda dalam tahap perencanaan pembangunan. Kemudian adalah penelitian yang dilakukan oleh Irwan, Adam Latif, dan Ahmad Mustanir (2021) yang berjudul “Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang”, temuan dari penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian pembangunan terhadap kebutuhan mendesak dari masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menimbulkan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan.

Hingga saat ini penelitian terkait perencanaan pembangunan semakin mengalami perkembangan, permasalahan yang diangkat seperti sumber daya untuk strategi pembangunan dan kontribusi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait dengan proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang terjadi di kawasan Margonda Kota Depok dalam melihat potensi unggulan untuk mendukung kegiatan perekonomian

kota. Dari kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya yang memperlihatkan bahwa Margonda merupakan pusat pertumbuhan perekonomian kota. Maka kebijakan pembangunan dan ekonomi pemerintah ditujukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan untuk mengawasi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif dan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan teori perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Lora Ekana Nainggolan, et al (2023), yang mana menurut penulis sangat cocok dan relevan digunakan dalam topik penelitian yang sedang dilaksanakan. Penerapan teori ini menjadi salah satu perbedaan utama antara penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa penelitian terdahulu, hal ini karena memberikan sudut pandang baru yang lebih luas sesuai akan dinamika dan kondisi yang diteliti, serta memperluas kajian dalam mewujudkan tujuan penelitian.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kondisi pembangunan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Depok khususnya di wilayah Margonda menjadi alasan peneliti untuk melakukan riset mendalam melalui artikel ilmiah yang berjudul “Proses Perencanaan Pembangunan dengan Menganalisis Potensi Unggulan Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Kawasan Margonda Kota Depok)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara praktis ataupun teoritis, serta untuk pemerintah dimana dalam penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam membangun kawasan Margonda untuk mendorong aktivitas perekonomian kota.

Kajian Pustaka

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan menurut Ariadi (2019) dalam penelitiannya didefinisikan sebagai berbagai komponen penting yang terdiri atas tujuan, kegiatan, dan waktu. Apa yang akan direncanakan tentunya merupakan berbagai tindakan masa depan. Sehingga dapat dipahami bahwa perencanaan adalah sebagai respon atau tanggapan terhadap masa depan. Dari definisi perencanaan yang disampaikan oleh Ariadi tersebut bisa disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan tidak akan pernah lepas dari ketiga komponen penting tersebut. Tujuan memperlihatkan arah yang akan dicapai, kegiatan mencerminkan berbagai langkah konkret yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan waktu menggambarkan kerangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut. Ketiganya saling terkait satu sama lain dan membentuk sebuah pola yang tersistematis dalam perencanaan.

Kemudian, dengan memahami ketiga komponen tersebut, perencanaan dapat dilihat sebagai sebuah respon akan masa depan. Hal itu karena perencanaan tidak hanya berfokus terhadap keadaan saat ini, namun lebih kepada bagaimana merancang dan mempersiapkan berbagai langkah yang diambil guna mewujudkan hasil yang diharapkan dimasa depan. Perencanaan menjadi media untuk mengelola dan mengantisipasi perubahan yang kemungkinan dapat terjadi, dan juga memastikan jika tujuan tersebut dapat terwujud dengan efektif dan efisien.

Selanjutnya, menurut Suwarna (2023) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa keberhasilan kegiatan perencanaan tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah saja, tetapi juga sangat bergantung terhadap peran berbagai aktor lainnya mulai dari tokoh masyarakat, swasta, dan tentunya masyarakat itu sendiri untuk mencapai sebuah kolaborasi. Dari pernyataan tersebut kelancaran dalam aktivitas perencanaan tidak hanya bergantung dari pihak pemerintah saja. Walaupun peran pemerintah begitu vital dalam memberikan kebijakan dan arahan, Suwarna menekankan bahwa kesuksesan dalam perencanaan juga turut dipengaruhi oleh dukungan dan kontribusi stakeholder lainnya. Kontribusi sektor swasta dalam perencanaan juga sangat penting, terlebih dalam hal permodalan dan penyediaan teknologi. Begitupun peran dari masyarakat yang harus

diikutsertakan dalam seluruh tahapan perencanaan agar segala aspirasi dan kebutuhan mereka dapat direalisasikan dalam program yang tengah dirancang. Tanpa adanya dukungan dan peran aktif dari masyarakat, perencanaan yang dilaksanakan mungkin tidak dapat terlaksana secara efektif, sebab tidak sesuai terhadap kenyataan di lapangan. Berikutnya adalah keterlibatan dari tokoh masyarakat yang tidak kalah penting dalam menjembatani dan membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah. Tokoh masyarakat dapat menjadi fasilitator yang menghubungkan seluruh pihak dan mendukung tercapainya kolaborasi dalam implementasi perencanaan. Oleh sebab itu, keberhasilan perencanaan bergantung terhadap kolaborasi dan sinergi yang erat antara semua pihak tersebut, yang mana setiap aktor tersebut membawa sumber daya dan keahlian yang saling mengimbangi.

Pembangunan menurut Siagian (Patarai, 2016) adalah sebuah perubahan, mewujudkan sebuah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang lebih baik dari kondisi saat ini. Berdasarkan definisi tersebut melalui pembangunan berbagai bidang seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, dan pendidikan akan mengalami perubahan yang mengarah terhadap peningkatan kualitas hidup. Proses tersebut tak hanya memengaruhi aspek material saja, namun juga membangun tatanan sosial yang kokoh, sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang lebih baik. Selanjutnya, pembangunan yang baik tentunya dapat melahirkan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang harmonis. Dengan adanya regulasi yang tepat dan implementasi yang dilakukan secara merata, pembangunan dapat meminimalisir ketimpangan ekonomi dan sosial. Setiap bangsa yang berkembang harus dapat mewujudkan kesetaraan dalam akses terhadap peluang dan sumber daya yang ada. Melalui pembangunan infrastruktur yang kuat, sistem pemerintahan yang terbuka dan transparan, serta sistem pendidikan yang baik, tentunya kita bisa memastikan kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Oleh sebab itu, pembangunan bukan hanya sekedar membangun fasilitas fisik saja, namun juga mewujudkan sebuah fondasi yang kuat untuk masa depan negara dan bangsa yang lebih baik. Kemudian pembangunan sebagai sebuah pertumbuhan menggambarkan kemampuan kelompok untuk bisa terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dimana hal ini secara mutlak harus ada dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan menurut Sjafrizal adalah cara atau teknik untuk menciptakan tujuan pembangunan secara efisien, tepat, serta terarah sesuai dengan kondisi daerah terkait (Ocktavia, 2022). Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan adalah langkah strategis yang penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang efektif dan efisien. Dengan perencanaan yang matang, seluruh proses pembangunan dapat dirancang dengan mencermati kebutuhan, potensi, dan masalah yang terdapat disuatu daerah. Sehingga perencanaan ini dapat dimanfaatkan dengan optimal dan tujuan yang akan dicapai bisa terwujud sesuai dengan tepat waktu dan anggaran yang terkontrol. Kemudian perencanaan pembangunan juga harus diselaraskan dengan keadaan spesifik dari setiap daerah. Setiap daerah mempunyai tantangan dan karakteristik yang berbeda, sehingga perencanaan yang dilaksanakan perlu memperhatikan berbagai faktor lokal, seperti budaya, sumber daya alam, dan demografi. Melalui perencanaan yang terkendali, pembangunan bukan hanya menjadi lebih terata dan tersistematis, namun juga lebih berkelanjutan dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan usaha yang dijalankan oleh setiap elemen masyarakat melalui proses yang bertahap dan tersusun untuk mewujudkan tujuan pembangunan dalam periode waktu tertentu.

Teori Tahapan Perencanaan Pembangunan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori tahapan perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Lora Ekana Nainggolan, et al (2023) dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan Pembangunan”, tahapan tersebut terdiri atas Identifikasi Masalah dan Potensi Daerah, Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan, Analisis Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan, Merumuskan Rencana Pembangunan, Rancangan Peraturan Daerah (Perda), dan Evaluasi dan Monitoring, yaitu sebagai berikut:

- (1) **Identifikasi Masalah dan Potensi Daerah**
Dalam tahapan ini adalah mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada di daerah tersebut, serta potensi dan keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.
- (2) **Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan**
Setelah mengidentifikasi potensi dan masalah daerah, langkah selanjutnya adalah menetapkan visi dan misi pembangunan. Visi adalah potret ideal mengenai kondisi yang diharapkan untuk masa yang akan datang, sementara misi adalah langkah strategis yang akan dipilih guna mewujudkan visi tersebut.
- (3) **Analisis Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan**
Di tahap ini, analisis kebutuhan dalam menunjang pembangunan mulai dilakukan yang melibatkan berbagai kebutuhan masyarakat dan beragam sektor pembangunan yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
- (4) **Merumuskan Rencana Pembangunan**
Dalam tahap ini melibatkan perumusan perencanaan pembangunan yang terdiri atas program, kegiatan, strategi, dan anggaran. Rencana pembangunan ini perlu melingkupi berbagai bidang kehidupan mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, dalam tahapan ini juga perlu adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak.
- (5) **Rancangan Peraturan Daerah (Perda)**
Setelah rencana pembangunan disusun, selanjutnya ialah menyusun rancangan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan rencana tersebut. Peraturan daerah ini harus memuat berbagai ketentuan terkait implementasi program, tata ruang, penggunaan lahan, serta pembiayaan.
- (6) **Evaluasi dan Monitoring**
Tahap terakhir adalah mengevaluasi pencapaian efektivitas program, tujuan pembangunan, dan pemanfaatan sumber daya. Sementara, monitoring dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah tersebut telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan memerlukan berbagai tahapan yang mendukung kelancaran dan keefektifan terwujudnya program pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah atau negara. Tahapan perencanaan yang dipaparkan dalam penelitian ini juga dijadikan dasar teori yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis isu yang diangkat. Dalam hal ini, terdapat 6 aspek utama yang menjadi hal terpenting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah. Pada tahap pertama yakni dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang pemerintah daerah miliki, yang penting untuk dapat memahami kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Identifikasi tersebut tentunya dapat membantu para pemangku kepentingan dalam memetakan potensi yang bisa dikembangkan dan isu yang harus segera diatasi.

Berikutnya, penetapan visi misi pembangunan yang mana ini menjadi langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan yang terarah dan jelas. Proses tersebut membutuhkan partisipasi dari banyak pihak untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditentukan merefleksikan kebutuhan daerah dan aspirasi dari masyarakat. Tahap

selanjutnya yakni menganalisis kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, ini kemudian menjadi kunci untuk memastikan jika sumber daya yang ada tersebut dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai terhadap prioritas yang sudah ditetapkan. Kemudian yang tidak kalah penting dalam perencanaan pembangunan ini melingkupi perumusan rencana pembangunan, penyusunan rancangan peraturan daerah, hingga mencapai evaluasi dan monitoring dari implementasi perencanaan pembangunan itu sendiri. Rencana pembangunan yang dilakukan secara mendalam dan rinci akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan, sedangkan pengawasan dan evaluasi memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan harapan yang hendak dicapai. Seluruh tahapan tersebut adalah bagian yang terintegrasi yang membentuk landasan teori dalam penelitian ini.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang berakibat terhadap barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sukirno (Rofii & Ardyan, 2017) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi sebab terdapat peningkatan sektor riil atau kegiatan yang mengarah pada produksi, baik berupa barang maupun jasa yang diperoleh dari suatu negara. Pengertian lainnya yaitu seperti yang diungkapkan oleh Rosyadah bahwa pertumbuhan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan daya tampung produksi untuk jangkauan pengeluaran yang terhitung dari penggunaan PDB dan PDRB di sebuah daerah (Ardian, et al., 2022). Secara keseluruhan berdasarkan pengertian sebelumnya, pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari meningkatnya kegiatan di sektor riil terutama yang berfokus terhadap sektor produksi. Aktivitas produksi yang melingkupi industri manufaktur, pertanian, pengolahan, serta sektor lainnya dapat mendukung peningkatan output jasa dan barang secara nyata. Ketika sektor riil ini berkembang, maka permintaan terhadap bahan baku, investasi, dan tenaga kerja pun ikut mengalami peningkatan, hingga pada akhirnya melahirkan multiplier effect terhadap perekonomian secara luas.

Dalam konteks negara atau daerah, peningkatan bidang produksi ini menjadi elemen utama dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sehat. Semakin tinggi nilai tambah yang diciptakan dari aktivitas produksi, maka semakin besar juga kontribusinya pada PDB (Produk Domestik Bruto). Oleh sebab itu, mendorong sektor riil menjadi langkah yang sangat strategis dalam menguatkan fondasi ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara keseluruhan, seperti yang diungkapkan oleh Rappa (Soleha, 2020) bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu negara dengan kondisi ekonomi yang ternilai berdasarkan beragam indikator tertentu selama jangka waktu tertentu. Indikator dalam pertumbuhan ekonomi ini seperti terdapat pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, jumlah pengangguran yang semakin sedikit dari pada jumlah tenaga kerja yang tersedia, serta tingkat kemiskinan yang rendah. Hal tersebut dapat menjadi barometer bahwa kegiatan pertumbuhan ekonomi dapat memperkirakan tingkat keberhasilan dan kemajuan suatu daerah atau negara yang dijalankan dalam jangka waktu tertentu.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus adalah penelitian mendalam mengenai organisasi, kelompok, individu, kegiatan, atau organisasi dalam rentang waktu tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan utuh dari sebuah objek dengan menciptakan data yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan sebuah teori (Abdussaman, 2021). Penelitian ini berfokus terhadap satu isu terkait peran serta

pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di kawasan Margonda Kota Depok sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan kesempatan aktif dari berbagai golongan masyarakat untuk menciptakan arah kebijakan pembangunan yang berkeadilan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, untuk wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yaitu dari Kepala Bidang PSDA Bappeda Kota Depok, Kepala Bidang IKW Bappeda Kota Depok, Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Bappeda Kota Depok, Kepala Bidang Koordinator Perencanaan Pengembangan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kota Depok, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro DKUM Kota Depok, serta dari pihak masyarakat. Selanjutnya, observasi dilakukan di sekitar kawasan Margonda yang menjadi lokus dalam penelitian ini. Sementara, data sekunder diperoleh melalui media elektronik (website) dan studi kepustakaan, studi kepustakaan disini berupa buku, jurnal, dan beberapa peraturan daerah yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Sugiyono, 2015). Teknik pertama ialah reduksi data yang berperan untuk memilah, meringkas, dan menyusun data mentah, sehingga nantinya hanya informasi penting dan relevan yang dipertahankan untuk memudahkan penulis agar tetap fokus terhadap inti masalah penelitian, sehingga tidak terganggu oleh berbagai data yang sifatnya tidak relevan dengan masalah yang diteliti. Tahap ke dua yaitu penyajian data, ditahap ini bertujuan untuk menampilkan informasi yang sudah direduksi ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti narasi, grafik, atau tabel. Terakhir adalah verifikasi data, yaitu untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang diperoleh, melalui triangulasi atau pengecekan kembali dari beberapa sumber. Verifikasi penting dilakukan untuk menjaga kredibilitas riset dan memastikan temuan yang diperoleh tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya untuk validitas data, dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, waktu, dan teknik. Teknik triangulasi sumber melibatkan pengumpulan informasi dan data dari beberapa sumber yang berbeda, seperti wawancara dengan berbagai informan berbeda yang penulis lakukan guna memperoleh perspektif yang akurat dan lengkap terkait isu yang diteliti. Melalui triangulasi sumber ini, penulis dapat mengurangi bias terhadap informasi yang kemungkinan timbul dari satu sumber saja. Berikutnya adalah triangulasi waktu, pada tahap ini data dikumpulkan dari berbagai waktu yang berbeda guna melihat konsistensi informasi yang didapat setiap waktu. Kemudian yang terakhir adalah triangulasi teknik, yang melibatkan beragam prosedur pengumpulan data, seperti dokumen, observasi, dan wawancara untuk saling memvalidasi dan melengkapi hasil penelitian. Tujuan dari penggunaan ketiga teknik tersebut adalah untuk meningkatkan ketepatan dan kredibilitas penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Depok dan institusi penelitian yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak bulan November 2024 sampai dengan bulan Februari 2025.

Hasil

Margonda merupakan ruas jalan arteri yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Kota Depok. Margonda merupakan jalan utama yang membentang dari Utara – Selatan dan menjadi penghubung antara Kota Depok dengan Kota Jakarta. Sementara itu, jalan ini juga sejajar dengan jalur kereta Jakarta – Bogor (Putra & Tinumbia, 2022). Di tahun 1960-an, jalan yang memiliki panjang 4 kilometer ini belum seramai sekarang. Saat itu,

sebagian besar kawasan Margonda masih berupa lahan pertanian. Akan tetapi, memasuki tahun 1980-an, kawasan Margonda mulai mengalami pembaruan. Menurut Tri Wahyuning M. Irsyam seperti yang dilansir dalam tirto.id, dalam bukunya yang berjudul “Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta: Sejarah Depok 1950-1990an” menerangkan bahwa telah terjadi pemindahan pusat pemerintahan Kota Depok dari Pancoran Mas ke Margonda pada saat kawasan tersebut ditetapkan sebagai kota administratif.

Masih didalam sumber yang sama melalui perubahan status tersebut membuat pembangunan infrastruktur di Jalan Margonda menjadi perhatian dan prioritas utama Kota Depok. Sehingga mulai banyak berdiri bangunan kantor rumah sakit, fasilitas publik, kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Jalan Margonda kemudian berubah menjadi jalur utama. Suasana semakin terasa ramai pada saat Universitas Indonesia dipindahkan dari Salemba ke Depok sejak tahun 1987. Aspek ekonomi, budaya, dan sosial di sekitar kawasan Margonda ikut bertransformasi.

Margonda adalah jalan utama Kota Depok yang mempunyai peran dalam Pusat Pelayanan Kota (PPK). Seiring dengan semakin pesat dan tingginya penduduk di Kota Depok, khususnya kawasan Margonda, kebutuhan terhadap fasilitas fisik semakin penting, hal tersebut untuk menunjang kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, sebab Margonda adalah salah satu daerah di Kota Depok menjadi pusat perekonomian kota. Seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 Pasal 13 Ayat 1 menyatakan bahwa Margonda merupakan salah satu Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Ayat 3 bahwa “Margonda berfungsi sebagai centre business district dengan kegiatan utama meliputi: pusat perdagangan dan jasa skala regional, perumahan, hunian vertikal, transit oriented development, pendidikan tinggi, kawasan pemerintahan, kawasan konservasi budaya, dan RTH”. Dari pernyataan tersebut bisa dibilang jika Margonda itu merupakan sebuah kawasan yang sangat strategis dari sudut pandang ekonomi.

Sebagai kawasan yang telah terpadu menjadi pusat perdagangan utama di Kota Depok sudah sepatutnya pembangunan di kawasan ini harus memerhatikan berbagai aspek penting guna menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Yolanda Effendy, et al (2024) dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah atau daerah yaitu sumber daya manusia dan entrepreneurship, sumber daya unggulan yang dapat dikelola, serta teknologi.

Faktor pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM), faktor SDM berkontribusi aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Mereka mempunyai peran yang mencakup beragam aspek, seperti dalam mengelola sumber daya yang ada, mendapatkan modal, serta pembangunan institusi sosial dan politik. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam pekerja. Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas dan moral yang profesional. Kedua hal tersebut harus dipenuhi dan tidak dapat dilaksanakan jika hanya salah satu saja, termasuk dalam berwirausaha. Wirausaha merupakan kunci dalam tahapan pertumbuhan ekonomi dan menjadi penentu. Wirausaha dianggap memiliki peran yang dinamis dan diperlukan dalam sebuah pertumbuhan ekonomi (Effendy, et al., 2024). Dilansir dari berita.depok.go.id, tingkat pengangguran di Kota Depok saat ini mengalami penurunan mencapai 6,79%. Hal itu terjadi karena sebanyak 70% warga Kota Depok telah memasuki usia produktif. Semakin meningkatnya usia produktif ini tentu menjadi PR bagi pemerintah Kota Depok untuk dapat meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada tersebut melalui pelatihan dan pendidikan. Sesuai dengan visi Kota Depok, pemerintah mempunyai berbagai program mulai dari peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sampai pembangunan infrastruktur sebagai penunjang aktifitas program pembangunan. Program pelatihan

tersebut tentu dapat memberikan keuntungan bagi lulusan baru yang ingin mempunyai skill yang mumpuni dalam menghadapi dunia kerja. Saat ini sudah banyak pelaku usaha dan UMKM yang menjalankan bisnisnya di Margonda, sebagian dari mereka dapat menjalankan usaha tersebut berkat program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, para pelaku usaha tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk menjadi bagian dari usaha mereka salah satunya dengan mempekerjakan masyarakat lokal, sehingga hal tersebut dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kota Depok.

Faktor selanjutnya ialah sumber daya yang dapat dimanfaatkan atau dikelola untuk melaksanakan roda perekonomian. Sumber daya yang dimaksud tersebut bisa berupa sumber daya alam, sumber daya modal, ataupun sumber daya manusia. Berkaitan dengan potensi dan sumber daya unggulan di Kota Depok sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 – 2025 bahwa kondisi sumber daya dan ekonomi Kota Depok saat ini telah mengarah terhadap struktur ekonomi tertentu, yakni struktur ekonomi modern yang bertumpu pada sektor sekunder ataupun tersier. Sektor tersier merupakan sektor ekonomi yang memanfaatkan keterampilan sumber daya manusia dalam mengadakan produk jasa. Saat ini berdasarkan laporan PDRB Kota Depok tahun 2019 – 2023 ada tiga lapangan usaha yang berkontribusi besar dalam perekonomian Kota Depok yakni industri perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor), konstruksi, dan industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel kontribusi pembentukan PDRB Kota Depok berikut ini:

Tabel 1.
“Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) tahun 2019-2023”

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,34	1,35	1,31	1,31	1,31
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	28,66	28,89	28,18	28,90	28,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28
E	Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	20,86	20,64	20,84	20,92	20,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,13	21,21	21,18	21,11	21,11
H	Transportasi dan Pergudangan	4,28	4,36	4,21	4,44	4,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,10	4,13	3,93	4,01	4,02
J	Informasi dan Komunikasi	1,78	2,35	2,37	2,32	2,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,98	4,08	4,25	4,31	4,31
L	Real Estat	1,62	1,69	1,76	1,82	1,82
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,19	0,20	0,20	0,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,71	2,55	2,38	2,20	2,19
P	Jasa Pendidikan	3,09	3,41	3,33	3,29	3,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,11	1,16	1,13	1,13
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,78	3,69	3,54	3,67	3,67
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan BPS Kota Depok terkait PDRB Kota Depok menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Depok pada tahun 2023 dihasilkan oleh ketiga sektor lapangan tersebut. Dapat dilihat bahwa industri pengolahan menyumbang sebesar 28, 86 persen, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan motor) sebesar 21, 11 persen, serta konstruksi sebesar 20, 93 persen. Sementara itu, kontribusi lapangan lainnya masih dibawah lima persen. Saat ini ketiga sektor tersebut dan beberapa sektor tersier lainnya mengalami perkembangan yang begitu pesat di kawasan Margonda Kota Depok. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari semakin menjamurnya usaha kecil dan menengah yang tumbuh dan berkembang. Di kawasan Margonda khususnya didominasi oleh sektor kuliner mulai dari cafe hingga restoran. Namun, selain menjadi pusat kuliner wilayah Margonda juga ditopang oleh bidang retail dan jasa. Hal tersebut karena lokasi Margonda ini yang begitu strategis serta dapat dijangkau oleh berbagai daerah yang ada di dalam ataupun luar Depok membuatnya menjadi lokasi transit bagi sebagian orang, sehingga kebutuhan terhadap bidang akomodasi pun semakin meningkat. Selain itu, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sektor tersier di kawasan Margonda semakin esensial, dengan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga, baik sektor industri ataupun jasa yang ada di kawasan Margonda menjadi salah satu tonggak utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kota.

Terakhir adalah faktor teknologi, teknologi merupakan faktor yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teknologi dapat menghasilkan efisiensi dan akar dari teknologi ini ialah inovasi. Oleh karena itu, menjadi kebutuhan utama yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Perubahan yang terjadi dalam bidang teknologi dianggap sebagai faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan tersebut berhubungan terhadap perubahan di dalam prosedur produksi yang merupakan hasil dari pembaharuan (Effendy, et al., 2024). Di dunia usaha terutama yang bergerak di bidang industri, tentunya kehadiran teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan, hal ini bertujuan tidak hanya untuk mempercepat proses produksi, tetapi agar seluruh aktivitas industri dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menciptakan model bisnis yang modern. Beberapa tahun belakang ini bisnis digital menjadi tren bisnis yang cukup prospektif. bisnis digital juga menjadi sebuah sarana bagi generasi muda untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi sebuah peluang bisnis. Sehingga bisnis digital dapat menjadi usaha yang akan mendorong terciptanya inovasi yang dapat memberikan ekosistem baru bagi pelaku usaha untuk memaksimalkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Dian Nufarida, 2021).

Menurut Dian Nufarida (2021) dalam bukunya yang berjudul “Gagasan Baru Ekonomi Kota Depok” ia mengungkapkan bahwa industri informasi dan komunikasi menguasai sebesar 22% usaha di Kota Depok. Untuk kawasan Margonda sendiri telah banyak berkembang industri kreatif dan start up yang mulai membuka usahanya di area tersebut. Jika potensi tersebut mampu dikelola dengan baik, para pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya secara online, tentunya hal ini dapat memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi kota. Selain itu, tingginya jumlah pengguna internet menjadi modal dasar Kota Depok untuk mengembangkan ekonomi berbasis digital yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, masih ditemukan UMKM dan beberapa pelaku usaha kecil lainnya yang belum dapat memanfaatkan media berbasis online tersebut untuk mempromosikan bisnisnya. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah bagaimana keberadaan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan seutuhnya oleh masyarakat secara merata, terutama untuk kaum muda. Sehingga dapat menciptakan peluang bisnis baru untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong pembangunan perekonomian di kawasan Margonda Kota Depok bisa dilihat dari sejauh mana pemerintah dapat berkolaborasi dengan

stakeholder lain dalam memenuhi berbagai faktor pertumbuhan ekonomi mulai dari teknologi, sumber daya manusia dan entrepreneurship, hingga potensi unggulan yang dapat dikelola. Pemerintah telah berusaha untuk memberikan pendidikan dan pelatihan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya. Kemudian disini dalam mendukung dalam proses penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Depok telah melihat adanya peluang yang dapat dikembangkan di beberapa daerah khususnya kawasan Margonda yang memiliki berbagai potensi untuk yang dapat dikelola untuk menopang perekonomian kota.

Diskusi

Analisis Potensi dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Margonda sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok berdasarkan Teori Perencanaan Pembangunan

Kegiatan pembangunan kawasan Margonda Kota Depok dapat dianalisis dengan berbagai tahapan perencanaan pembangunan yang memiliki peranan penting dalam menentukan pelaksanaan yang efektif dan efisien dari setiap program pembangunan. berikut ini adalah hasil analisis perencanaan pembangunan kawasan Margonda Kota Depok dengan menggunakan teori tahapan perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Lora Ekana Nainggolan, et al (2023) dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan Pembangunan”, yaitu sebagai berikut:

(1) Identifikasi Masalah dan Potensi Daerah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, masalah utama yang diharapkan oleh pelaku usaha di kawasan Margonda adalah kemacetan. Hal tersebut mengakibatkan proses pendistribusi barang menjadi terhambat, tentunya kondisi ini dapat mempengaruhi terhadap efisiensi operasional bisnis. Selain kemacetan masalah lain yang dihadapi oleh pelaku usaha di kawasan Margonda adalah keterbatasan lahan yang semakin sempit dan berkurang. Pembangunan yang marak terjadi di kawasan tersebut mengakibatkan ruang untuk berkembang menjadi sangat terbatas, akibatnya pelaku usaha menghadapi kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka. Keadaan ini mengakibatkan adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan lahan yang strategis dan sesuai akan kebutuhan usaha, yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha tersebut. Selanjutnya, mahalnya harga lahan di kawasan Margonda juga menjadi hambatan bagi pelaku bisnis. Adanya kenaikan lahan yang signifikan pada akhirnya membuat pelaku usaha kesulitan untuk mendapatkan properti yang sesuai terhadap anggaran yang mereka miliki. Kemudian, harga sewa yang tinggi juga memengaruhi biaya operasional dan profit yang diperoleh oleh pelaku usaha. Dengan keadaan seperti itu, banyak pelaku usaha yang terdesak antara terbatasnya modal yang tersedia dengan kebutuhan terhadap lokasi yang strategis.

Selanjutnya adalah dalam mengidentifikasi potensi yang ada di kawasan Margonda. Pemerintah Kota Depok telah melihat secara seksama potensi yang dimiliki oleh kawasan Margonda, terutama di sektor tersier yang dapat menjadi pondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kota. Beragam sektor seperti industri kreatif, kuliner, mall, ritel, perbengkelan, hingga fashion menjadi salah satu pendorong utama ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang. Keberagaman sektor ini memperlihatkan adanya perkembangan ekonomi yang kuat dan adanya peluang untuk pelaku usaha dalam berkompetisi dan berinovasi. Berbagai sektor tersebut bukan hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah secara signifikan, namun juga mendatangkan investasi dan melahirkan lapangan pekerjaan. Sektor kuliner dan industri kreatif contohnya kian hari semakin menarik perhatian para pengunjung dan wisatawan, menjadikannya

sebagai daya tarik yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Begitupun dengan bidang perbengkelan, ritel, dan pusat perbelanjaan yang terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat, dengan mengoptimalkan potensi ini, Pemerintah Kota Depok mempunyai komitmen untuk mewujudkan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam tahap identifikasi masalah dan potensi daerah, pemerintah Kota Depok hingga saat ini belum dapat melaksanakan kebijakan atau menjalankan upaya yang efektif guna mengatasi permasalahan yang ada khususnya di kawasan Margonda, seperti masalah kemacetan yang semakin parah, serta tingginya harga sewa bangunan dan lahan di kawasan Margonda. Kemacetan yang timbul berdampak secara langsung terhadap kelancaran kegiatan ekonomi dan mobilitas penduduk, sementara harga sewa yang terus mengalami peningkatan membebani para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Walaupun pemerintah menyadari pentingnya kedua persoalan tersebut untuk segera diatasi dalam mendukung perekonomian daerah, namun belum ada langkah konkret yang bisa menangani masalah tersebut dengan optimal. Akan tetapi, dalam mengidentifikasi peluang dan potensi Pemerintah Kota Depok memandang bahwa wilayah Margonda difokuskan untuk pusat pelayanan kota serta kegiatan perniagaan yang meliputi usaha jasa, kuliner, pusat perbelanjaan, pendidikan, industri kreatif, ritel, dan konstruksi yang dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian kota.

(2) Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan

Dalam menentukan visi dan misi pembangunan, Pemerintah Kota Depok telah berupaya untuk merumuskan ke arah yang jelas berdasarkan pada kondisi dan gambaran ideal saat ini yang diharapkan terwujud di waktu mendatang. Salah satu visinya yang tercantum dalam RPJPD ialah menjadikan Kota Depok sebagai pusat jasa dan perdagangan yang berkembang secara pesat. Visi tersebut memuat harapan untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi yang dapat mendukung kemajuan daerah, dengan fokus utama terhadap pengembangan wilayah yang mempunyai potensi besar di sektor jasa dan perdagangan, salah satunya saat ini terpusat di kawasan Margonda. Walaupun visi tersebut terbilang ambisius dan terdapat landasan yang kuat, tapi realitanya Pemerintah Kota Depok masih menjumpai beragam hambatan dalam memahami kondisi di lapangan. Terdapat banyak kebijakan yang sepenuhnya belum mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, terutama dalam sektor jasa dan perdagangan yang menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah. Terlepas dengan adanya visi yang jelas, pelaksanaan kebijakan di lapangan dirasa masih kurang efektif, terlebih dalam pelayanan publik yang belum sepenuhnya optimal.

Salah satu hambatan atau tantangan besar yang dijumpai ialah kesenjangan antara rencana pembangunan dengan realitas yang ada di masyarakat. Di lapangan, masyarakat masih mengeluhkan beragam masalah mengenai kemacetan, kualitas layanan publik, dan infrastruktur yang belum memadai. Hal tersebut memperlihatkan bahwa walaupun visi pembangunan telah dirumuskan dan dirancang dengan baik, proses pelaksanaannya belum mampu mencapai kebutuhan riil masyarakat dan bidang ekonomi yang akan dikembangkan. Masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi saat ini juga menjadi tantangan serius bagi terwujudnya visi tersebut. Kesenjangan sosial yang masih terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kota Depok, serta kondisi perekonomian yang tidak merata ini tentu saja dapat menghambat perkembangan sektor jasa dan perdagangan yang diharapkan bisa tumbuh lebih pesat, mengingat berbagai sektor tersebut sangat bergantung terhadap daya beli masyarakat.

Selain itu, masalah infrastruktur yang belum memadai dan kemacetan juga secara langsung berpengaruh terhadap kesuksesan kegiatan ekonomi di daerah ini. Margonda sebagai pusat kegiatan ekonomi masih menghadapi kemacetan setiap saat, yang tentunya memengaruhi efisiensi biaya dan waktu, baik bagi masyarakat ataupun para pelaku usaha. Tanpa adanya perbaikan yang dilakukan secara serius dalam hal pengelolaan transportasi dan infrastruktur, visi pembangunan sebagai pusat jasa dan perdagangan akan sulit terwujud. Secara umum, walaupun Pemerintah Kota Depok telah merumuskan dan menyusun visi dan misi pembangunan yang menggambarkan kondisi ideal masa depan, hambatan di lapangan seperti masalah ekonomi, sosial, dan infrastruktur masih menjadi tantangan besar. Pemerintah harus lebih memahami dan menyelaraskan kebijakan dengan keadaan riil yang ada di masyarakat, serta memberikan perhatian lebih kepada perbaikan layanan publik dan solusi dari masalah sosial yang dapat menghambat kemajuan daerah.

(3) Analisis Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan

Dalam hal menganalisis kebutuhan dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Depok perlu mengikutsertakan berbagai pihak, termasuk dengan para pelaku bisnis di kawasan Margonda. Kolaborasi yang terjalin antara sektor swasta dan pemerintah begitu penting untuk dapat memahami secara mendalam terkait kebutuhan apa saja yang harus diusahakan oleh pemerintah guna menunjang kegiatan perekonomian dan Pemerintah Kota Depok khususnya di kawasan Margonda. Pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di kawasan tersebut mempunyai wawasan langsung mengenai peluang dan tantangan ekonomi yang ada, sehingga mereka bisa memberikan masukan yang dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif terhadap perekonomian lokal.

Pentingnya keterlibatan pelaku usaha di dalam proses perencanaan ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Mereka mempunyai informasi yang bisa memberikan gambaran yang jelas dan luas terkait kebutuhan regulasi pajak, infrastruktur, dan berbagai program pendukung lainnya yang bisa mempercepat serta mempermudah pertumbuhan di bidang ekonomi yang ada. Dengan melibatkan para pelaku usaha, pemerintah kota bisa memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diimplementasikan memang relevan dan dapat meningkatkan daya saing serta produktivitas perekonomian daerah secara menyeluruh. Akan tetapi, jika dilihat secara mendalam Pemerintah Kota Depok hingga saat ini nampaknya masih berfokus terhadap pengembangan sektor jasa, pusat perbelanjaan, bisnis F&B, dan ritel di kawasan Margonda. Meskipun semua sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian lokal, kita tidak dapat menutup mata terhadap potensi sektor lain yang mempunyai peluang besar, seperti sektor pariwisata.

Pembangunan sektor pariwisata ini dapat menjadi salah satu prioritas yang penting, terlebih dalam meningkatkan pendapatan daerah dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Sektor tersebut dapat melahirkan peluang baru terhadap pelaku usaha lokal, mulai dari restoran, akomodasi, serta penyediaan jasa lainnya. Hal ini mengingat Margonda adalah jendela utama bagi Kota Depok, sebab letaknya yang strategis dan bisa diakses oleh berbagai daerah di sekitarnya menjadikan wilayah ini cukup menjanjikan untuk dikembangkan sektor pariwisata. Selain itu, dengan adanya pengembangan di sektor wisata juga bisa mendatangkan investasi domestik ataupun asing yang berpengaruh secara langsung terhadap perekonomian kota. Dengan demikian, Kota Depok tak hanya bergantung pada salah satu sektor ekonomi saja, namun dapat meraih pertumbuhan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi Pemerintah Kota Depok untuk mengevaluasi kembali prioritas pembangunan yang ada. Selain meneruskan pengembangan sektor

jasa, F&B, ritel, dan pusat perbelanjaan, sektor pariwisata juga harus dijadikan salah satu fokus utama dalam pembangunan. Dengan pendekatan yang holistik dan menyertakan seluruh stakeholder, termasuk pelaku bisnis di kawasan Margonda diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang efektif dan tepat. Sehingga pembangunan di Kota Depok dapat terlaksana dengan seimbang dan memberikan dampak yang positif serta maksimal bagi seluruh pihak.

(4) Merumuskan Rencana Pembangunan

Dalam merumuskan rencana pembangunan daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi, Pemerintah Kota Depok melakukan kerja sama kepada berbagai stakeholder untuk turut berpartisipasi salah satunya melalui Musrenbang. Dalam Masrenbang tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, LPM, Camat dan Lurah, serta perwakilan anggota DPRD. Adanya Musrenbang tersebut bertujuan untuk memotivasi partisipasi dan peran masyarakat dalam mengambil keputusan, membahas, merumuskan, dan menyetujui kegiatan serta program yang menjadi prioritas pembangunan, khususnya program prioritas per Kecamatan (propokopim.depok.go.id).

Adapun di dalam Musrenbang tersebut harus membahas terkait isu yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun masalah banjir dan kemacetan kota menjadi isu yang tak pernah luput untuk dibahas. Apalagi masalah kemacetan yang terjadi di jantung Kota Depok yaitu Margonda. Hal ini perlu segera diatasi oleh pemerintah, kondisi Margonda yang semakin hari semakin ramai serta kegiatan perekonomian yang semakin meningkat membuat kebutuhan akan sarana dan prasarana infrastruktur semakin meningkat pula. Sarana dan prasarana tersebut tidak hanya untuk masyarakat sekitar saja, namun juga dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di kawasan Margonda. Fasilitas seperti lahan dan bangunan sangat diperlukan bagi pelaku bisnis. Hal inilah yang dikeluhkan oleh beberapa pelaku usaha di Margonda, mereka merasa bahwa keberadaan infrastruktur di area tersebut belum mumpuni. Apabila keberadaan sarana dan prasarana belum cukup tersedia, maka akan menghambat kegiatan perekonomian di suatu wilayah.

(5) Rancangan Peraturan Daerah (Perda)

Pada tahap ini pemerintah Kota Depok belum dapat merepresentasikan sebuah kebijakan yang partisipatif. Proses pembentukan kebijakan ini dirasa kurang melibatkan berbagai elemen terkait, khususnya masyarakat yang seharusnya menjadi bagian terpenting dalam pengambilan keputusan tersebut. Dilihat dari pengakuan beberapa elemen masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan atau dalam sosialisasi program. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM di kawasan Margonda bahwa ia belum pernah dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang atau dalam sosialisasi program yang dilakukan oleh pemerintah. Minimnya diskusi dan dialog yang dilakukan antara masyarakat dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak secara langsung terhadap kehidupan mereka. Pengakuan dari elemen masyarakat tersebut memperlihatkan jika mereka tidak diikutsertakan dalam pembuatan Raperda tersebut. Masyarakat yang semestinya menjadi pihak yang paling merasakan pengaruh dari regulasi tersebut merasa aspirasi mereka tidak cukup didengar. Minimnya keterlibatan ini memunculkan kesan bahwa kebijakan yang dihasilkan tersebut tidak seutuhnya mewakili kepentingan publik.

Kemudian, kegiatan atau program yang akan dijalankan pada tahun berjalan seiring berjalannya waktu antara usulan dengan yang terlaksana terdapat gap. Walaupun berbagai aspirasi dan usulan sudah disampaikan, namun realitanya dalam implementasinya banyak tidak terealisasi dengan baik. Hal tersebut memperlihatkan

adanya kekurangan dalam proses transformasi dari perencanaan ke tindakan, yang menimbulkan kontradiksi antara harapan dan hasil yang diperoleh. Pada akhirnya terdapat kebijakan yang tidak relevan atau tidak efektif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Akan tetapi, meskipun begitu dalam peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah telah sepenuhnya mencakup implementasi program, penggunaan lahan, tata ruang, dan pembiayaan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

(6) **Evaluasi dan Monitoring**

Dalam hal ini pemerintah kota telah membentuk bidang yang bertugas dalam pengaduan dan pengawasan regulasi. Bidang ini mempunyai peranan yang penting dalam memastikan jika seluruh regulasi yang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan memberikan pengaruh positif bagi publik. Kehadiran bidang ini memungkinkan adanya sistem pengawasan yang lebih akuntabel dan transparan dalam proses pembangunan. Bidang ini tidak hanya bertugas untuk memonitoring jalannya kebijakan, namun juga untuk memastikan jika implementasi program atau kegiatan tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Kemudian bidang tersebut juga nantinya turut mengawasi secara langsung apakah kebijakan atau program yang dibentuk tersebut dalam implementasinya menemukan pelanggaran atau tidak, baik yang bersifat hukum atau administratif.

Selanjutnya, dengan keberadaan bidang ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan atau keluhan apabila menjumpai ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan yang dirasa dapat merugikan mereka. Kemudian apabila kebijakan atau regulasi tersebut dalam implementasinya masih dirasa kurang oleh masyarakat atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk merevisi, memperbaiki, atau membuat baru kebijakan atau regulasi dari yang telah disahkan. Proses pengaduan ini juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan regulasi, yang kemudian dapat membantu pemerintah untuk menyesuaikan atau memperbaiki kebijakan tersebut. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi ini perlu dilakukan secara berkesinambungan terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang matang, maka perlu melalui berbagai tahapan atau proses agar dapat membantu dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan daerah secara berkelanjutan, efektif, dan terencana, serta untuk dapat mengetahui apa saja kebutuhan dan prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tahapan-tahapan tersebut terdiri atas tahap identifikasi masalah dan potensi daerah, menetapkan visi dan misi pembangunan, analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan, merumuskan rencana pembangunan, rancangan Peraturan Daerah (Perda), serta evaluasi dan monitoring. Apabila tahapan-tahapan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan atau program yang diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien tidak akan terwujud.

Kesimpulan

Pembangunan merupakan sebuah usaha dalam melaksanakan perubahan dan pertumbuhan yang dilakukan secara sadar oleh sebuah negara dan bangsa dengan cara mengadakan dan mengatur kebutuhan dan prioritas yang belum ada untuk mewujudkan kehidupan modern yang lebih baik. Akan tetapi, pembangunan yang baik adalah yang berdasarkan pada perencanaan pembangunan yang matang. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses dalam membuat berbagai keputusan atau alternatif yang telah tersistem serta berdasarkan pada fakta dan data yang digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan berbagai aktivitas atau kegiatan yang bersifat non fisik atau fisik untuk

mewujudkan tujuan yang diharapkan. Selain itu, adanya desentralisasi yang mana pemerintah memberikan keleluasan dan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengembangkan pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki daerahnya. Hal ini berfokus pada pengambilan berbagai inisiatif yang bersumber dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mendorong peningkatan ekonomi dan mewujudkan peluang kerja baru.

Dalam penelitian ini penulis menyoroti pembangunan yang ada di Kawasan Margonda Kota Depok yang merupakan sebuah kawasan strategis dan menjadi pusat perekonomian kota. Margonda menjadi sebuah wilayah yang turut berperan dalam menyumbang perekonomian Kota Depok. Hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan yang berfokus terhadap bidang jasa, kuliner, industri kreatif, mall, dan real estate. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan perekonomian di wilayah tersebut tentunya perlu dibarengi oleh pembangunan yang masif. Untuk mendukung program pembangunan tersebut tentunya perlu melalui berbagai tahapan perencanaan pembangunan agar menciptakan program pembangunan yang lebih baik dan efektif sesuai dengan visi dan misi, tahapan perencanaan pembangunan tersebut meliputi tahap identifikasi masalah dan potensi daerah, menetapkan visi dan misi pembangunan, analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan, merumuskan rencana pembangunan, rancangan Peraturan Daerah (Perda), serta evaluasi dan monitoring. Selain itu, tahapan-tahapan tersebut juga harus disertai oleh berbagai faktor pendorong dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah yang menjadi pondasi dalam pembangunan daerah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah atau daerah yaitu sumber daya manusia dan entrepreneurship, sumber daya unggulan yang dapat dikelola, serta teknologi.

Oleh karena itu, melihat pembahasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah kegiatan yang sangat penting, sebab dengan perencanaan tersebut kita dapat melihat arah pembangunan daerah kedepannya, dengan tetap memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan tentunya terlebih dahulu dilakukan dengan menganalisis berbagai indikator perkembangan daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran, indeks pembangunan manusia, kondisi keuangan daerah, serta berbagai faktor lainnya. Selain itu, perencanaan pembangunan juga perlu melibatkan elemen masyarakat dalam penyusunannya, karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat dapat memberikan peluang secara langsung kepada publik untuk berkontribusi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi selama penelitian berlangsung. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Dr. Rahman Mulyawan, Drs., M. Si. dan Bapak Jajang Sutisna, M.I.Pol. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan pendampingan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Terima kasih juga kepada Bappeda Kota Depok, DKUM Kota Depok, dan DPMPTSP Kota Depok karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian disana. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan artikel ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan juga masukan yang membangun demi penyempurnaan artikel ini.

Deklarasi Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam menyusun penelitian ini.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Alexander, H. B. (2019). Mengenal Konsep Pengembangan Mixed Use. Retrieved 24 April 2024, from <https://properti.kompas.com/read/2019/11/02/102007621/mengenal-konsep-pengembangan-mixed-use?page=all>
- Amrin, A., Mahmud, M. K., & Nurfurkon, A. (2023). Implementasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Sumedang. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, pp. 42-55. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i1.3357>
- Ardian, R., et al. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Junal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 1(3). <https://doi.org/10.58192/ebismen.v1i3.90>
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.54>
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), pp. 8-21. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>
- Effendy, Y., Andriawan, A., Rawati, M., Hawari, R., & Al-Amin, A. A. (2024). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Islam di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 3(1), pp. 1-8. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v3i1.23>
- Hidayat, A., et al. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6). <https://doi.org/10.47492/jip.v3i6.2133>
- Inati, UI & Salahudin. (2022). Inovasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Ekowisata: Sebuah Kajian Pustaka Sistematis. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 6(1). <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.14-29>
- Irwan, I., Latif, A., & Mustanir, A. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), pp. 137-151.
- Nainggolan, L. E., et al. (2023). *Perencanaan Pembangunan*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Noviyanti, D., et al. (2020). Analisis Perkembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat Untuk Arah Pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan. *Jurnal Geografi*, 12(1).
- Nufarida, D. (2021). *Gagasan Baru Ekonomi Kota Depok, Problem, Solusi, & Falsafah Bisnis*. Depok: Azza Media.
- Prokopim Kota Depok. (2018). Musrenbang sebagai Media Untuk Mendorong Peran dan Partisipasi Masyarakat. Retrieved 1 Februari 2025, from <https://prokopim.depok.go.id/musrenbang-sebagai-media-untuk-mendorong-peran-dan-partisipasi-masyarakat/>
- Ocktavia, N. N. (2022). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perbandingan Sistem Perencanaan Pembangunan di Era Orde Baru dan Reformasi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu).
- Patarai, M. I. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*. Makassar: De La Macca.
- Putra, R. T., & Tinumbia, N. (2022). Evaluasi Fasilitas Pedestrian. *Jurnal ARTESIS*, 2(2), pp. 212-217. <https://doi.org/10.35814/artesis.v2i2.4305>

- Rahayu, E., & Suroso, A. (2020). Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 4(2), 134-152. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i2.252>
- Redaksi. (2021). Hasbullah: Timbulnya Margondasentris Akibat Pembangunan di Depok Belum Merata. Retrieved 1 Januari 2025, from <https://www.faktabandungraya.com/2021/06/hasbullah-timbulnya-margondasentris.html>
- Rofii, A. M. & Ardyan, P. S. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1).
- Sudianing, N. K. & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2). <https://doi.org/10.37637/locus.v11i2.284>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, B., Sugiharto, T., Haryanti, D. A., & Marina, N. (2023). Optimalkan Pertumbuhan Umkm: Pendampingan Teknologi Dan Manajemen di Kota Depok. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Darma Saskara*, 2(2). pp. 53–61. <http://dx.doi.org/10.35760/abdimasug.2022.v2i2.10011>
- Suwarno, R. (2023). Collaborative Governance Dalam Menciptakan Branding Kota Surakarta Sebagai Kota Festival. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(2). pp. 160-184.
- Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *EKOMBIS: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(20). <https://doi.org/10.35308/ekombis.v6i2.2881>
- Syaifuldin, R., et al. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Wilayah antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2). <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1688>
- Taufiqurokman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Yunani, A. (2022). *Isu-isu perencanaan pembangunan (teori dan praktek)*. Purwokerto: CV. IRDH.
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026.
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042.